

IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Tri Murwaningsih*

Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan PIPS, FKIP Universitas Sebelas Maret

***Alamat korespondensi:** Jalan Kelud II No 5 RT 5 RW 7 Griya Papahan Indah, Tasikmadu, Karanganyar, Telp. (0271) 6497798, HP 08122620725

ABSTRACT

Responding to the global challenge, education is expected to make an effort of service quality assurance of education (Quality Assurance) and produce graduate students who fulfill the standard. Implementation of quality assurance by higher education at university will be able to give the best academic service for the students. The result of the research is to inform that there are three study programs that have implemented quality assurance: Economics Education, Geography education and Mechanical Engineering Education. However, there are 10 steps in quality assurance which have not been already implemented. Reward and punishment have not been implemented for the lecturer yet.

Kata kunci: implementasi, penjaminan mutu, layanan pendidikan, pendidikan, sumber daya manusia

PENDAHULUAN

Pendidikan pada era global memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidangnya, untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan bersaing dalam menjawab tantangan global. Untuk itu diperlukan suatu sistem pendidikan yang sistematis, terencana dan terarah yang meliputi seluruh aspek yang terlibat dalam pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Sallis (2006) Standar mutu pendidikan dapat berupa pemilikan atau akuisisi kemampuan dasar pada masing-masing bidang pembelajaran, dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain itu, pihak manajemen juga harus menentukan standar mutu materi ku-

rikulum standar evaluasi yang akan dijadikan sebagian alat untuk mencapai standar kemampuan dasar. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu (*quality assurance*) dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam pasal 91 ayat 1 PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Pemerintah mengharapkan agar setiap lembaga pendidikan itu bermutu, karena dengan pendidikan bermutu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu

yang akan memberi kontribusi kepada keberhasilan pembangunan.

Untuk mencapai pendidikan bermutu maka penjaminan mutu sangat penting untuk dilaksanakan di semua tingkatan pendidikan termasuk di perguruan tinggi. Dengan melaksanakan penjaminan mutu, perguruan tinggi akan dapat memberikan pelayanan akademik terbaik bagi mahasiswanya, mengelola program dan sumber daya yang dimiliki secara optimal, meningkatkan kualitas berkelanjutan yang lebih jelas, terarah dan mudah dilaksanakan serta perguruan tinggi akan mampu dan siap memasuki era kompetisi secara nasional dan internasional.

Universitas Sebelas Maret sedang menggalakkan implementasi penjaminan mutu baik di tingkat universitas maupun fakultas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) merupakan fakultas terbesar dengan dua puluh program studi (prodi), sejak tahun 2007 juga sudah berupaya menggiatkan pelaksanaan penjaminan mutu di semua program studi. Penjaminan mutu hanya dapat dilaksanakan oleh fakultas yang sehat, berkembang dan sustainabel.

Berdasarkan pengamatan, pelaksanaan penjaminan mutu program studi di lingkungan FKIP UNS belum optimal. Belum semua prodi melaksanakan penjaminan mutu. Ada beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penjaminan mutu, antara lain belum adanya komitmen yang kuat dari para dosen untuk melaksanakan penjaminan mutu, banyaknya dosen yang studi lanjut, dan belum adanya *reward* serta *punishment* yang jelas. Karena itu, untuk melaksanakan penjaminan mutu ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, mulai dari adanya komitmen yang kuat pada pelaksanaan akademik, *internal driven*, adanya tanggung jawab dan pengawasan melekat oleh pengelola sampai pelaksanaan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penjaminan mutu di seluruh prodi yang ada di lingkungan FKIP UNS, secara terinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Apa-

kah seluruh prodi yang ada di lingkungan FKIP UNS sudah mengimplementasi penjaminan mutu? Kalau belum, apa kendalanya?; (2) Apakah seluruh prodi yang ada di lingkungan FKIP UNS sudah memiliki tim penjaminan mutu? Kalau belum, apa kendalanya?; (3) Tahap-tahap apa saja yang sudah diimplementasikan dalam penjaminan mutu?; (4) Indikator-indikator apa saja yang sudah dijamin mutunya?; dan (5) Bagaimana sistem *reward* dan *punishment* bagi dosen?.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penjaminan mutu di seluruh prodi yang ada di lingkungan FKIP UNS dan lebih khusus untuk mengetahui hal-hal berikut ini: (1) Kendala dalam implementasi penjaminan mutu; (2) Keberadaan tim penjaminan mutu di setiap program studi; (3) Tahap-tahap yang sudah dilaksanakan dalam penjaminan mutu; (4) Indikator-indikator yang sudah dikonstruksikan dalam penjaminan mutu; dan (5) *Reward* dan *punishment* yang diberikan kepada dosen.

Dalam dunia pendidikan, kualitas dapat diterjemahkan ke dalam empat pendekatan yaitu *quality assurance*, *contract conformance*, *customer driven quality*, dan *quality of process and inputs*. Pendekatan pertama adalah *quality assurance* yang mengacu pada penentuan standar, metode yang cocok dan syarat-syarat kualitas yang ditentukan oleh dewan pakar, yang dibarengi dengan proses monitoring, pengukuran dan evaluasi yang dimaksudkan untuk mengkaji sampai sejauh mana praktik yang dijalankan oleh institusi pendidikan tersebut memenuhi standar yang dimaksud. Dari perspektif ini jelas bahwa setiap institusi pendidikan harus menyiapkan *benchmark* dan ukuran peningkatan kualitas (*measure of progress*).

Menurut buku Pedoman Penjaminan Mutu (Depdiknas Ditjen Dikti, 2003) penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain

yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Secara umum kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) penjaminan mutu didasarkan atas indikator-indikator kinerja yang bersifat umum, terbuka dan objektif, yang dirumuskan berdasarkan pernyataan-pernyataan tujuan yang dijadikan sebagai alat penilaian mutu pendidikan; (2) penjaminan mutu dilakukan melalui proses yang transparan dan interaktif melalui penilaian diri dan inspeksi penjaminan mutu; dan (3) penjaminan mutu dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan berbagai aktivitas dalam proses penjaminan mutu dan manajemen, serta nilai-nilai tradisional dan kebutuhan-kebutuhan pendidikan untuk berubah.

Dalam sistem manajemen mutu, suatu institusi pendidikan harus melakukan setidaknya empat hal, yaitu; (1) perencanaan mutu (*quality planning*, QP) termasuk penetapan standar mutu pada awal periode, (2) pengendalian mutu (*quality control*, QC), jaminan mutu (*quality assurance*, QA), dan peningkatan mutu (*quality improvement*, QI).

Menurut buku Pedoman Penjaminan Mutu (Depdiknas Ditjen Dikti, 2003), tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh perguruan tinggi, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, objektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu

pendidikan tinggi secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan dan tujuan bisa tercapai.

Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi dapat dilaksanakan, maka terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan penjaminan mutu tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Para pelaku proses penjaminan mutu di suatu perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan.

Paradigma baru penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi harus menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya agar visinya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan misi, serta agar *stakeholders* dapat dipuaskan. Dengan paradigma ini, tugas pemerintah diringankan, akuntabilitas perguruan tinggi meningkat, *stakeholders* berperan lebih besar dalam menentukan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi.

Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa didahului dengan perencanaan. Dapat dikemukakan fakta bahwa dalam skala makro, rencana induk pengembangan (RIP) suatu perguruan tinggi, sebagian besar disusun untuk memenuhi persyaratan akreditasi, sedangkan dalam skala mikro dapat dikemukakan fakta tentang rendahnya persentase dosen yang membuat rencana pembelajaran berupa satuan acara perkuliahan (SAP) dan masih banyak lagi fakta yang menunjukkan bahwa suatu perguruan tinggi menjalankan pendidikan tinggi tanpa perencanaan. Kalaupun perencanaan, pada umumnya bukanlah karena kebutuhan, melainkan karena persyaratan perizinan atau akreditasi. Sikap mental semacam itu harus diubah pada suatu sikap mental baru, yaitu rencanakanlah pekerjaan Anda dan kerjakanlah rencana Anda.

Pengorganisasian serta mekanisme kerja organisasi penjaminan mutu pendidikan tinggi, tidak terdapat pola baku yang harus diikuti oleh semua perguruan tinggi. Pengorganisasian penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi sangat tergantung pada ukuran, struktur, sumber daya, visi dan misi, sejarah, dan kepemimpinan di perguruan tinggi.

Faktor terpenting yang perlu mendapat perhatian dalam pengorganisasian penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah bahwa pengorganisasian tersebut mampu menumbuhkan kesepahaman tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut, yang pada gilirannya akan menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen di perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu

Dalam renstra FKIP disebutkan bahwa Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS adalah “Menjadi LPTK pengembang dan penghasil tenaga pendidik yang berkarakter kuat dan cerdas”.

Misinya, yaitu; (1) Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan bimbingan secara efektif untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang unggul, berdaya saing tinggi, mandiri dan berkepribadian; (2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran serta mampu menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang kependidikan; (3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kependidikan yang bermanfaat bagi masyarakat; dan (4) Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang menunjang pengembangan bidang kependidikan.

Dengan mengacu kepada visi dan misi sebagaimana disebutkan di atas, tujuan yang akan diwujudkan FKIP adalah sebagai berikut: (1) Menghasilkan lulusan dengan indeks prestasi kumulatif tinggi dan berkepribadian pendidik serta masa studi dan masa tunggu makin pendek; (2) Menghasilkan penelitian dan pengembangan yang semakin meningkat dalam kualitas maupun kuantitas; (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang semakin meningkat

dalam kualitas dan kuantitas; (4) Menghasilkan produk-produk inovatif dalam bidang kependidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan, prioritas pengembangan FKIP diletakkan pada pengembangan mutu secara menyeluruh dengan kebijakan umum sebagai berikut. Pertama, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, yang mencakup: (a) Peman-tapan sistem penerimaan mahasiswa baru; (b) Penyesuaian daya tampung FKIP dengan kebutuhan; (c) Pembukaan/pengembangan konsentrasi/program studi/jurusan baru yang selektif; (d) Penyelenggaraan program sertifikasi guru/pendidikan profesi guru; (e) Pengoptimalan pemanfaatan kampus (ruang); (e) Penyiapan akreditasi institusi. Kedua, Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, antara lain: (a) Sosialisasi visi, misi, dan tujuan FKIP UNS; (b) Penerapan paradigma baru manajemen Perguruan Tinggi di semua unit kerja FKIP; (c) Penerapan Penjaminan Mutu (*quality assurance*) di fakultas, jurusan, dan program studi; (d) Pengembangan *learning faculty*; (e) Peningkatan status akreditasi Program Studi di FKIP; (f) Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak; (g) Peningkatan kualitas akademik yang relevan bagi tenaga pengajar; (h) Peningkatan kualitas tenaga administrasi; (i) Peningkatan kemampuan dosen dalam penguasaan ilmu, bahasa asing dan teknologi informasi dan kemampuan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan *student center learning* (SCL); (j) Peningkatan kemampuan dosen dalam penguasaan ilmu, bahasa asing dan teknologi informasi dan kemampuan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan SCL; (k) Pengembangan sistem informasi fakultas dan kehumasan; (l) Peningkatan jumlah mutu jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional pada tingkat program studi; (m) Peningkatan kualitas lulusan FKIP UNS di semua program studi sehingga dapat berperan aktif di masyarakat dan bersaing secara kompetitif; (n) Peningkatan jumlah dan mutu produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat; (o) Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; (p) Penyusunan *self evaluation* (SE) fakultas; (q) Pengembang-

an mutu keilmuan mahasiswa dan pengabdian pada masyarakat; (r) Pengembangan minat dan bakat mahasiswa; (s) Peningkatan kesejahteraan mahasiswa; (t) Pemberdayaan alumni; (u) Pengoptimalan pemberdayaan aset FKIP; (v) Penambahan/penataan sarana prasarana gedung dan lingkungan; (w) Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran. Ketiga, Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik terdiri dari; (a) Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Fakultas; (b) Peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan; (c) Peningkatan kualitas SDM; (d) Integrasi manajemen program pascasarjana bidang pendidikan; (e) Peningkatan peran orang tua mahasiswa dalam pengembangan fakultas; (f) Pelaporan kinerja secara periodik; (g) Pengembangan pencitraan publik. Keempat, Sasaran Mutu. Sasaran mutu FKIP UNS sampai akhir tahun 2011 adalah sebagai berikut; (a) Memperbaiki kualitas pengelolaan FKIP menuju lembaga yang sehat dan berdayasaing; (b) Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan, hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (c) Memantapkan sistem pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai program pengembangan; (d) Meningkatkan daya tampung dan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan kepada semua lapisan masyarakat; (e) Dalam rangka menyongsong otonomi perguruan tinggi, FKIP UNS meningkatkan kualitas kerjasama dengan *stakeholders* dalam menggalang partisipasi masyarakat. Sistem Penjaminan Mutu Akademik. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat fakultas, jurusan, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin; (a) Adanya kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik; Adanya kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi dan spesifikasi sesuai dengan yang ditetapkan pada setiap program studi; (b) Adanya kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi dan standar kompetensi yang akan diupayakan secara

nyata; (c) Adanya kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi dan standar kompetensi yang akan diupayakan secara sungguh-sungguh oleh program studi; (c) Adanya relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Penjaminan mutu akademik internal merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi/bidang keahlian khusus serta dosen secara umum. Kelima, Pernyataan Mutu. “Dengan komitmen yang tinggi terhadap mutu dan berlandaskan sepuluh budaya kerja, FKIP berkomitmen menghasilkan lulusan yang berkarakter kuat dan cerdas serta IPTEKS yang unggul di tingkat internasional” Komitmen yang tinggi terhadap mutu sebagaimana yang dimaksud dinyatakan di dalam naskah komitmen bersama yang dikemukakan oleh semua jajaran pimpinan di lingkungan FKIP dan merupakan kesepakatan bersama adalah sebagai berikut: (a) Memiliki kesamaan kepentingan dan kesadaran spiritual untuk mewujudkan Visi FKIP UNS dalam membentuk Tenaga Kependidikan yang berkarakter kuat dan cerdas; (b) Memiliki kesamaan kepentingan dan kesadaran spiritual dalam mewujudkan Misi FKIP UNS melalui peningkatan daya saing institusi melalui; (c) komunikasi yang produktif, efektif, dan santun; (d) prestasi sebagai keberhasilan bersama berdasarkan *standard of performance* yang disepakati bersama; (e) apresiasi atas kekuatan dan keunggulan (*advantage*) dari masing-masing institusi; (f) menjadikan “Kebodohan dan ketidaklayakan dalam melayani konsumen FKIP UNS” menjadi musuh bersama untuk dikikis dan diperbaiki secara terus menerus. Ketujuh, Model Penjaminan Mutu Akademik. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholder*, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di UNS dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (*degree of excellence*).

Melalui komitmen yang tinggi terhadap mutu, FKIP berusaha mewujudkan lulusan yang berkarakter kuat dan cerdas dan mampu secara terus-menerus belajar serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu pendidikan di FKIP juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan civitas academica dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas).

Sistem penjaminan mutu akademik dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi. Dengan demikian universitas juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi. Model penjaminan mutu FKIP mengadopsi model penjaminan mutu UNS. Hal ini dilakukan karena model tersebut di samping diarahkan untuk memperbaiki kualitas kinerja tingkat program studi sebagai ujung tombak penyelenggara pendidikan juga sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan status akreditasi masing-masing program studi.

Metode penelitian. Dalam rangka memperoleh kebenaran dari suatu penelitian, maka penelitian yang dilaksanakan harus dengan prosedur yang sistematis, terencana, mengikuti konsep ilmiah dan didasarkan pada data empiris. Menurut Hadi (2000: 4) metodologi adalah ilmu-ilmu yang memperbincangkan cara-cara (metode) ilmiah.

Pada penelitian ini, berusaha untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dan data yang telah terkumpul kemudian disusun, dianalisis baru dijelaskan hasilnya dengan menggunakan metode tertentu sehingga dapat menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk dapat menggambarkan keadaan objek penelitian pada masa sekarang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta tersebut, yaitu implementasi penjaminan mutu di FKIP UNS. Bentuk penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Kirk & Miller (Moleong, 2001: 3) mengatakan, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian ini hanya mengkaji satu variabel, yaitu tentang implementasi penjaminan mutu di FKIP

Pada penelitian ini, strategi yang dipilih akan digunakan untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian sekaligus mendukung dalam penentuan sampling serta pemilihan instrumen yang digunakan untuk memilih informasi. Strategi yang digunakan adalah tunggal terpancang, artinya (a) Penelitian ini disebut tunggal karena hanya memfokuskan pada satu permasalahan yaitu implementasi penjaminan mutu di FKIP UNS dan (b) Penelitian ini terpancang artinya, peneliti terjun ke lapangan sudah memiliki bekal yang berupa asumsi-asumsi atau teori yang sudah ada.

Lofland & Lofland (Moleong, 2001: 112), mengatakan bahwa, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data penelitian ini antara lain: (1) informan; (2) tempat dan peristiwa; dan (3) arsip dan dokumen. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian dan dapat memberikan informasi yang tepat kepada peneliti. Informan harus mempunyai informasi yang banyak tentang pengalaman dan latar belakang. Informan dalam penelitian ini adalah ketua prodi/BKK di lingkungan FKIP UNS, karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap implementasi penjaminan mutu di tingkat paling bawah. Tempat dan peristiwa menjadi sumber data

karena dalam pengamatan harus sesuai dengan tujuan penelitian, situasi dan kondisi yang melibatkan pelaku dan peristiwa. Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah di program studi di lingkungan FKIP UNS. Dalam penelitian ini, sumber data diambil dari arsip dan dokumen berupa kurikulum, silabus, dan jumlah mahasiswa.

Pada penelitian ini, pengambilan sampel atau sampling merupakan cara untuk memperkecil kekeliruan dalam generalisasi dari sampel ke populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan alasan: (1) Teknik ini mampu menangkap kedalaman data yang akan diperoleh dari informan kunci; (2) Data yang diperoleh dari teknik ini benar-benar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan peneliti; dan (3) Apabila data yang diperoleh sudah dianggap cukup, maka peneliti dapat menghentikan penelitian.

Di samping teknik *purposive sampling*, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*, maksudnya informan dapat bertambah, apabila dianggap data yang didapat masih kurang. Informan satu dapat menunjuk ke informan lain. Hal ini juga untuk *cross check* data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) analisis dokumen.

Sebelum mengadakan wawancara langsung di lapangan, peneliti mempersiapkan panduan wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang berkembang sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka agar informan merasa bebas tanpa adanya tekanan-tekanan, sehingga data yang diperoleh dapat objektif. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara observasi langsung ke lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid di lapangan. Analisis dokumen merupakan penyelidikan terhadap bahan-bahan tertulis yang ada untuk menemukan fakta-fakta dari suatu kegiatan. Dokumen yang ditemukan dipelajari, dianalisis dan disimpulkan untuk memperkuat hasil penelitian.

Validitas data adalah keaktualan atau kesahihan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu (1) derajat kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) kebergantungan (*dependability*) dan (4) kepastian (*confirmability*).

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan data menggunakan triangulasi data, yaitu dengan cara memanfaatkan suatu yang lain dari luar data. Untuk mengecek data dengan cara membandingkan terhadap data yang satu dikontrol dengan data yang sama dari sumber yang berbeda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teknik mengalir dan interaktif. Analisis ini mempunyai tiga alur kegiatan, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, dan (3) penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Pengumpulan data ini dilakukan terus-menerus sampai data memadai dan akan dihentikan apabila dirasa sudah cukup dalam rangka pengambilan kesimpulan. Pada langkah reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan penelitian berlangsung. Reduksi data kegiatannya mulai dari proses pemilihan data, penyederhanaan, pengabstrakan dan mentransformasikan data kasar dan membuang data yang berkurang berguna, sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan akhir. Penyajian data merupakan suatu usaha menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh di lapangan dan disajikan secara sistematis dan jelas. Hal ini untuk membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan teori yang ada. Setelah data disajikan dan dianalisis, maka kegiatan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Apabila data yang diperoleh tidak valid, maka proses analisis perlu diulang kembali sampai diperoleh data yang akurat dan cocok, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya.

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari kegiatan prala-

pangan, lapangan, dan penulisan laporan penelitian. Kegiatan pra lapangan yang dilakukan adalah dengan membuat suatu proposal sebagai pedoman, mencari data awal tentang pentingnya permasalahan dan mempersiapkan kegiatan secara teknis. Setelah adanya pedoman penelitian yang sistematis dan jelas, maka peneliti terjun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan, baik data primer maupun sekunder. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis. Data yang relevan dianalisis dan yang tidak relevan dibuang. Analisis ini dilakukan secara intensif dan obyektif untuk dapat ditarik suatu kesimpulan akhir. Tahap terakhir adalah penulisan laporan. Penyusunan laporan ini dimulai dari hasil penelitian sampai pada penarikan kesimpulan, kemudian laporan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selaras dengan perumusan masalah penelitian dan analisis data, maka dapat dikemukakan hasil penelitian dan pembahasannya berikut ini.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Program Studi

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu sangat penting untuk dilaksanakan agar dapat mencapai kualitas pendidikan yang maksimal.

Secara umum, program studi yang ada di lingkungan FKIP telah melaksanakan penjaminan mutu. Namun ada beberapa yang belum melaksanakan penjaminan mutu dikarenakan belum adanya SOP dan tim penjaminan mutu yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dari 20 prodi di lingkungan FKIP yang benar-benar telah melaksanakan dengan baik hanya tiga program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Geografi dan Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Program Studi Pendidikan Ekonomi menja-

minkan mutunya pada aspek tingkat kehadiran dosen dalam mengajar, kesesuaian materi perkuliahan dan kesesuaian jumlah sks dengan waktu mengajar. Program Studi Pendidikan Geografi menjamin mutunya pada aspek proses pembelajaran antara lain: tingkat kelulusan untuk setiap mata kuliah, kehadiran dosen, waktu konsultasi per minggu. Hasil pembelajaran (*output* dan *outcome*) dan kegiatan ilmiah dosen. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin menjamin mutunya pada aspek tata pamong dan sistem pengelolaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, sistem informasi, kemahasiswaan, sistem pembelajaran dan penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat dan hasil karya lainnya. Sedangkan program studi lainnya hanya sebatas sudah melaksanakan namun tidak ada laporan yang tertulis.

Keberadaan Tim Penjaminan Mutu

Agar pelaksanaan penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik, perlu adanya tim khusus yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penjaminan mutu. Tim penjaminan mutu bertugas untuk ikut meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di FKIP. Sebenarnya, setiap program studi sudah memiliki Tim Penjaminan Mutu, namun pada kenyataannya baru tiga program studi yang telah menjalankan tugas penjaminan mutu tersebut, yaitu Program Studi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Geografi, dan Pendidikan Teknik Bangunan.

Belum terlaksananya kegiatan penjaminan mutu di setiap program studi berdasarkan hasil penelitian dikarenakan banyaknya dosen-dosen yang sedang melanjutkan studi baik S2 dan S3 sehingga dosen-dosen yang aktif jumlahnya terbatas.

Tahap-tahap Pelaksanaan dalam Penjaminan Mutu

Ada sepuluh tahap dalam proses penjaminan mutu, yaitu: (1) Membangun komitmen dan kepercayaan antara program studi, dosen dan mahasiswa; (2) Membentuk *task force* yang memiliki idealisme terutama dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkelan-

jutan; (3) Menetapkan *performance indicators* mutu kegiatan pembelajaran yg ingin diukur; (4) Menetapkan standar awal untuk setiap *performance indicators*; (5) Mengukur *performance indicators* pada akhir semester ke-T; (6) Membandingkan capaian dari hasil masing-masing *performance indicators* dengan standar yang telah ditetapkan pada semester ke-T; (7) Melakukan evaluasi untuk tujuan kinerja semester yang akan datang; (8) Membandingkan kembali capaian dari masing-masing *performance indicators* dengan standar yang telah ditetapkan; (9) Mengkaji peningkatan antara capaian semester ke-T dan semester ke-T+1 untuk masing-masing *performance indicators*; dan (10) Mengkaji peningkatan antara capaian semester ke-T+2 untuk masing-masing *performance indicators*, demikian dan seterusnya.

Secara umum baru beberapa tahap yang telah dilaksanakan pada program studi di lingkungan FKIP. Dan setiap program studi berbeda-beda dalam mengimplementasikan tahap-tahap yang telah disebutkan diatas.

Indikator-indikator Penjamin Mutu Penyelenggaraan

Berdasarkan hasil penelitian pada umumnya indikator-indikator yang telah dijamin mutu penyelenggaraannya adalah: (1) Monitoring kegiatan perkuliahan yaitu seberapa lama dosen memberikan perkuliahan apakah sudah sesuai jadwal atau mengurangi waktu yang telah ditetapkan (selesai sebelum waktunya atau datang terlambat terlalu lama; (2) Kehadiran dosen dalam perkuliahan/mengajar; (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan; (4) Waktu penyelesaian skripsi atau tugas akhir; (5) Lama studi mahasiswa; dan (6) Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan.

Sistem Reward dan Punishment yang Telah Diberikan

Reward adalah penghargaan yang diberikan kepada dosen atas prestasi yang telah diraihinya, sedangkan *punishment* adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada dosen atas kesalahan yang telah dilak-

kan. Berdasarkan hasil penelitian pada umumnya *reward* dan *punishment* diberikan kepada dosen dalam bentuk pemberian nilai DP3 dan proses kenaikan pangkat. Bagi dosen yang berprestasi diberikan nilai DP3 yang maksimal serta kemudahan dalam proses kenaikan pangkat, demikian sebaliknya bagi dosen yang sering membuat kesalahan diberikan nilai DP3 yang kurang memuaskan dan penundaan proses kenaikan pangkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang telah terkumpul, diolah kemudian dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah yang telah diterapkan sebelumnya. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan; (2) Secara umum program studi di lingkungan FKIP sudah mengimplementasikan penjaminan mutu. Namun, yang benar-benar sudah melaksanakan dengan baik hanya tiga program studi, yaitu Pendidikan Ekonomi, Geografi, dan Teknik Bangunan; (3) Secara umum program studi di lingkungan FKIP sudah memiliki tim penjaminan mutu, namun belum maksimal dalam melakukan penjaminan mutu di program studinya; (4) Dari 10 tahap implementasi penjaminan mutu belum semua dilaksanakan; (5) Hanya indikator-indikator tertentu yang telah dikontraskan dalam sistem penjaminan mutu; dan (6) Secara umum *reward* dan *punishment* dosen diberikan dalam wujud penilaian DP3 dan kemudahan atau penundaan proses kenaikan pangkat.

Berlandaskan simpulan di atas maka dapat dikemukakan saran-saran berikut ini.

Kepada fakultas hendaknya pimpinan: (1) selalu mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penjaminan mutu di lingkungan FKIP dan (2) Adanya *reward* dan *punishment* bagi program studi yang telah dan belum mengimplementasikan penjaminan mutu dengan baik.

Kepada Ketua Prodi diharapkan: (1) kenaikan pangkat bagi dosen-dosen yang mengimplementasikan penjaminan mutu; berprestasi dan dosen yang membuat kesalahan; (2) dapat menjadi motivator bagi dosen-dosen dalam mengimplementasikan penjaminan mutu; dan (3) ada sistem *reward* dan *punishment* selain penilaian DP3 dan proses. Dengan adanya penjaminan mutu diharapkan dosen dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2003). *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Moleong, L.J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Renstra FKIP Universitas Sebelas Maret tahun 2005 – 2009.
- Sallis, Edward. (2006). *Management Mutu Pendidikan*. (Terjemahan). Yogyakarta: IRCiSoD.